

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KOTA TANGERANG SELATAN

Taufiqurokhman

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

Email : taufiqurokhman1971@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian Implementasi kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pelayanan dari pelaksanaan tujuan pendidikan terbagi dalam beberapa jenis, Yaitu; tujuan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional.

Dengan adanya pendidikan di Indonesia diharapkan terjadinya perubahan pada bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan memiliki akhlak yang baik serta budi pekerti yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan penelitian ini merupakan studi kasus, konteks penelitian ini akan mengungkap fenomena sosial yang beragam dan mengungkap dan memahami fenomena yang belum diketahui dan belum banyak diketahui.

Hasil penelitian dari penggabungan Sekolah Dasar Negeri dalam satu kawasan dilakukan pada 2008 Sekolah Dasar negeri di 7 (Tujuh) kecamatan Kota Tangerang Selatan yang menghasilkan 157 Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Penggabungan Sekolah Dasar, Peningkatan Mutu Pendidikan.*

ABSTRACT

Research objectives Implication of the policy of Merging Public Elementary Schools is expected to improve the quality of education services in South Tangerang City. While services from the implementation of educational goals are divided into several types, namely; national, institutional, curricular and instructional goals. With the existence of education in Indonesia it is expected that changes in the nation will occur and make Indonesia a developed nation that has good character and high character.

This study uses a qualitative research methodology using descriptive research design. The qualitative approach was chosen on the grounds that this study was a case study, the context of this study would be to uncover diverse social phenomena and reveal and understand phenomena that are unknown and not yet widely known.

The results of the study from the merger of Public Elementary Schools in one area were carried out in 2008 state elementary schools in 7 (seven) sub-districts of South Tangerang City which produced 157 public elementary schools resulting from the merger.

Keywords: *Policy Implementation, Merging of Primary Schools, Improving Education Quality.*

PENDAHULUAN

Dalam sebuah organisasi ada beberapa tahap yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, hal tersebut tertuang pada visi dan misi organisasi yang dibuat baik nonprofit atau pun pemerintahan, hal-hal yang mengatur sebuah organisasi tersebut terdapat pada ADRT (Anggaran Dalam Rumah Tangga) organisasi tersebut. Sehubungan dengan itu dibuatlah beberapa langkah untuk mencapainya agar terlaksana dengan baik tanpa me... ngurangi kaidah-kaidah yang diharapkan atau tidak keluar dari konteks yang ada di organisasi, setiap organisasi mempunyai planning, organizing, actuating dan controlling dalam menjalankan tujuan organisasi.

Organisasi merupakan sebuah wadah yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai kesamaan tujuan didalamnya, maka dari itu untuk mencapai persepsi yang berbeda-beda dimasing-masing orang diperlukan beberapa langkah untuk mengurangi resiko kekeliruan atau kesalah pahaman yang terjadi dimasing-masing anggota di organisasi tersebut.

Didalam UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tercantum pengertian pendidikan ." pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Pendidikan Nasional berfungsi Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul mulia, seha't, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting untuk menentukan kemajuan suatu negara. Apabila kualitas pendidikan disuatu negara baik yang artinya angka putus sekolah rendah, buta huruf hampir tidak ada dan pendidikan sembilan tahun sudah berjalan dengan baik serta tidak adanya diskriminasi pendidikan maka negara tersebut akan menjadi negara yang memiliki generasi yang dapat membangun serta memajukan bangsa, Tujuan pendidikan merupakan sesuatu

yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut jenisnya terbagi dalam beberapa jenis yaitu, tujuan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. Dengan adanya pendidikan di Indonesia diharapkan terjadinya perubahan pada bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan memiliki akhlak yang baik serta budi pekerti yang tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan dasar salah satunya dilakukan di Sekolah Dasar (SD). Sekolah Dasar merupakan suatu jenjang paling dasar dalam pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dan MI dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki dasar-dasar karakter, kecakapan, ketrampilan, dan pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan potensi diri secara optimal sehingga memiliki ketahanan dan keberhasilan dalam pendidikan lanjutan, serta kehidupan yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Tujuan bangsa Indonesia tertera dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945, diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa ialah melalui pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan.

Pernyataan ini dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31. Sebagai upaya perwujudan amanat UUD 45 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional membuat rencana strategis (2010: 39) yang memuat enam pilar kebijakan pokok pembangunan pendidikan yakni: meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; mewujudkan kelestarian dan memperkuat kebudayaan Indonesia.

Langkah pertama yang tertera pada renstra adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan. Program ini merupakan program pokok untuk pemenuhan pendidikan bagi warga negara, terutama pendidikan dasar yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan pendidikan nasional

.Kegiatan pokok dalam upaya meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan terdiri dari beberapa kegiatan utama ,salah satunya melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (mergetj sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai. Tercapainya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja negara untuk pembiayaan pendidikan dasar merupakan kunci utama diadakannya kegiatan merger. Pembiayaan pendidikan, terutama anggaran untuk pendidikan dasar negeri, sebagian besar masih bergantung pada pemerintah pusat. Sementara itu, masalah utama dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia terletak pada keterbatasan anggaran.

Jumlah sekolah yang melebihi kapasitas, terutama sekolah-sekolah tidak produktif dapat menyita anggaran untuk operasionalnya terutama untuk pemeliharaan gedung sekolah. Seharusnya, anggaran untuk sekolah yang tidak produktif dapat dialihkan untuk usaha peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan dana pendidikan tidak efisien.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia turut memberikan andil besar terhadap kebijakan penggabungan sekolah dasar .Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi bahkan cenderung berlebih pernah terjadi sekitar tahun 1970-an Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah penduduk Indonesia secara nasional. Jumlah penduduk yang sangat besar memaksa pemerintah menambah layanan publik, tidak terkecuali layanan pendidikan. Banyak sekolah-sekolah baru dibangun, gedung-gedung sekolah ditambah, pengangkatan tenaga pendidikan secara besar-besaran.

Kota Tangerang Selatan Mempunyai motto Cerdas, Modern dan Religius. Guna mewujudkan motto tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD). Yaitu melaksanakan urusan dibidang pendidikan. Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan dibidang pendidikan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mempunyai visi dan misi yaitu: mengoptimalisasi layanan pendidikan dalam rangka terwujudnya Kata Tangerang Selatan sebagai kota

Pendidikan yang Cerdas, modern dan Religius dan misinya mempertahankan dan meningkatkan pendidikan yang Responsif, adil dan merata guna mewujudkan semua hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang merupakan serangkaian proses meningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat serta memenuhi hak tiap-tiap warga Negara. Yaitu mendapat pendidikan yang bermutu dan berkualitas, dalam proses pemenuhan standar diperlukan indikator dan target, baik dalam pelaksanaan prosedur peningkatan dan produk mutu yang dapat diwujudkan.

Standar Pelayanan Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, SPM Pendidikan merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan kota Tangerang Selatan. Baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui sekolah, penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa

disetiap sekolah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses proses pembelajaran yang memadai.

SPM diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu Pendidikan. Sehingga kedepannya juga diharapkan berimplikasi pada mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi, SPM mulai diberlakukan tahun 2011 dengan tahapan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah pelatihan guru dan tenaga pendidik. Maka diharapkan dalam waktu tiga tahun atau pada tahun 2014 seluruh SD/MI dan SMP/MTs sudah melaksanakan SPM.

SPM Pendidikan meliputi layanan yang merupakan tanggung jawab langsung pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan untuk sekolah atau kantor departemen agama untuk madrasah (misalnya : Penyediaan ruang kelas dan penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi). dengan ditetapkannya SPM Pendidikan Dasar maka setiap daerah perlu menyusun perencanaan program /kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukurnya Dinas Pendidikan perlu melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan serta sekolah-sekolah, dengan demikian dalam mengembangkan

rencana peningkatan mutu pendidikan setiap kabupaten/kota perlu memperhatikan kondisi pencapaian SPM.

Pelaksanaan dan capaian program juga dimonitor dan dievaluasi sehingga diketahui indikator apa saja yang belum dicapai. dan dalam hal penataan ruang kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai pusat pelayanan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa, berskala regional dan nasional yang mandiri, aman, nyaman asri, produktif berdaya saing, dan berkelanjutan serta berkeadilan dalam mendukung Kota Tangerang Selatan. Sebagai bagian dari kawasan strategis nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Dengan banyaknya jumlah Sekolah Dasar Negeri Kota Tangerang Selatan ditambah dengan adanya masalah-masalah pendidikan di Kota Tangerang Selatan maka pemerintah Kota Tangerang Selatan membuat kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Tangerang Selatan. Kebijakan program merger atau penggabungan Sekolah Dasar di kota Tangerang Selatan telah dimulai sejak awal tahun 2015 berdasarkan keputusan WaliKota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada

Peraturan pemerintah nornor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaah pendidikan. Kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri diwujudkan dalam dua cara yaitu: Penggabungan dua Sekolah atau lebih dalam satu lokasi yang sama dimana dua sekolah yang berbeda digabung menjadi satu manajemen dengan satu kepala sekolah.

Penggabungan dua sekolah atau lebih dalam satu kawasan atau kelurahan yang letaknya berdekatan dan jarak antara sekolah tersebut tidak lebih dari 1 km. Penggabungan sekolah tersebut dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan yaitu: mempunyai jumlah peserta didik yang sedikit atau melebihi kapasitas dari gedung sekolah, sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memenuhi standar dan jumlah rombongan belajar yang kurang. Penggabungan sekolah tersebut mempunyai harapan agar adanya suatu perubahan yang mengarah pada sisi positif untuk pendidikan Sekolah Dasar negeri di Kota Tangerang Selatan.

Penggabungan Sekolah Dasar negeri dalam satu kawasan dilakukan pada 208 Sekolah Dasar negeri di 7 (Tujuh) kecamatan Kota Tangerang Selatan yang menghasilkan 157 Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan. Penggabungan Tujuan Penggabungan

Sekolah Dasar ini dalam rangka meningkatkan mutu, kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidika, mewujudkan tata kelola Manajemen Sekolah, memberikan layanan pendidikan yang optimal kepada masyarakat, meningkatkan standar pelayanan Minimal (SPM) sesuai RPJMD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Penggunaan Sarana dan prasarana lebih optimal. Besar harapan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan bahwa dengan adanya kebijakan ini terjadi suatu efisiensi terhadap dana pendidikan pada Sekolah Dasar negeri Kota Tangerang Selatan dan akan membawa pendidikan Kota Tangerang Selatan khususnya pada tingkat Sekolah Dasar menjadi lebih baik.

Namun pada kenyataannya dalam proses implementasi kebijakan ini banyak terjadi konflik. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kesiapan masing-masing sekolah terkait dengan penggabungan sekolah ini sehingga terjadi suatu kesenjangan antar Sekolah Dasar tersebut. Kepala Sekolah yang merupakan hal penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan penggabungan ini juga masih mempunyai banyak kendala karena minimnya pengalaman. Selain itu, tenaga pengajar juga menjadi hal yang harus diperhatikan dimana setelah

dirumuskan bahkan diimplementasikan kebijakan ini banyak masalah yang timbul terkait dengan tenaga pengajar. Masalahnya adalah bagaimana pengajar di suatu Sekolah Dasar Negeri disatu padukan dengan Sekolah Dasar Negeri lain.

Hal inilah yang kemudian mengakibatkan adanya suatu kecemburuan antar tenaga pengajar, dan juga pada proses penggabungan tersebut terjadinya pemborosan anggaran yaitu dari hasil perubahan nomenklatur sekolah maka harus adanya pengadaan barang seperti cetak map sekolah dan dokumen lainnya. Berdasarkan penjabaran mengenai permasalahan diatas, maka diperlukan adanya evaluasi pada saat pelaksanaan kebijakan penggabungan Sekolah Dasar di Kota Tangerang Selatan, karena kebijakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Tangerang Selatan ini terdapat banyak sekali masalah-masalah serta hambatan-hambatan yang kemudian timbul setelah kebijakan ini diimplementasikan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat evaluasi pelaksanaan suatu kebijakan adalah salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan.

Selain itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan, SD hasil penggabungan selaku subyek kebijakan

dan aktor-aktor terkait diharapkan dapat memberikan peran serta aktif sehingga pada saat implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik. Pengawasan dari pihak masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya suatu kebijakan publik yang baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Tangerang Selatan"

LANDASAN KONSEPTUAL

Penelitian terdahulu.

Guna memberikan perbandingan terhadap penelitian ini, beberapa penelitian yang telah terlebih dahulu dilakukan secara tidak langsung dapat dijadikan referensi. Penelitian-Penelitian tersebut adalah: (1) Implementasi kebijakan merger Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Simalungun oleh Malau Walter Edward 2010, Dari hasil penelitian diketahui bahwa Seiring proses perkembangan pembangunan, Pemerintah menekankan penguatan sektor pendidikan. Pemerintah memberi perhatian khusus pada pendidikan dasar atas peningkatan sumber daya manusia sejak usia dini dan menjangkau hingga ke wilayah pelosok. Selain pengadaan fisik

bangunan, perlu dipersiapkan pengadaan dan penempatan tenaga pengajar yang tersebar merata ke seluruh wilayah. Beberapa sektor lain dalam pembangunan juga meningkatkan program-program yang mengarah pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya adalah program Keluarga Berencana (KB).

Efektifitas keberhasilan program ini antara lain adalah menurunnya jumlah anak usia sekolah pada rentang waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terjadi pula distribusi yang tidak merata antara jumlah tenaga pengajar dengan anak didik. Pemerintah harus menghitung ulang sekolah-sekolah dasar yang masih layak beroperasi atau harus bergabung. Pemerintah Pusat, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri mengedarkan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Merger), Sekolah Dasar. Pemerintah Kabupaten Simalungun mempedomani edaran tersebut. Identifikasi dilakukan di tiap wilayah Kecamatan se-Kabupaten Simalungun. Kajian atas berbagai data yang dihimpun di lapangan menghasilkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/4140-Dikjar tanggal 18 Juni 2001 tentang Pembentukan Tim Penggabungan (Merger) Sekolah Dasar

Negeri di Kabupaten Simalungun dan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/7320-Dikjar atanggal 20 Agustus 2001 tentang Penggabungan/Penghapusan dan Penggantian Nama Beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun menghunjuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun sebagai unit kerja yang mendapat peran dominan (leading agency) dalam mengkoordinir, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kegiatan bersama semua unit atau satuan kerja yang dilibatkan dalam program yang sedang dijalankan.

Selama proses kegiatan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Simalungun menerapkan prinsip aliran kerja *eciprocal*, dalam arti harus mampu membina hubungan baik secara timbal balik bersama seluruh unit/instansi yang dilibatkan dalam Tim Penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Simalungun dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (a). struktur organisasi, meliputi pembagian tugas yang jelas antar unit organisasi, kemampuan (kapabilitas) seorang

atasan menjalin hubungan yang baik dengan bawahan dalam struktur termasuk dengan instansi lain yang dilibatkan dalam struktur; (b). sumber daya manusia, berkaitan dengan personil yang terlibat cukup memadai memahami dan keahlian dalam mencapai tujuan kebijakan; (c). koordinasi, penyatupaduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit organisasi sehingga masing-masing bagian memberikan sumbangan yang optimal pada hasil keseluruhan.

Hasil yang dicapai sejak dilaksanakannya Penggabungan (merger) Sekolah Dasar di Kabupaten Simalungun. Hal ini terlihat pada efisiensi kegiatan belajar-mengajar, perbandingan yang cukup rasional antara jumlah tenaga pendidik dengan anak didik pada setiap SD, dan dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir. Hasilnya diperoleh capaian persentase kelulusan siswa SD yang meningkat cukup signifikan; (2) Pengaruh Penggabungan (merger) Sekolah Dasar Terhadap Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan se-Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. (Dwi Budi Susanto, 2010). Sekolah sebagai suatu sistem, mencakup beberapa komponen, dan setiap komponen terdiri dari beberapa faktor. Yaitu satu sama lainnya saling

terkait. sehingga membentuk suatu sistem.

Komponen - komponen sistem sekolah terdiri dari masukan (input), proses (process), keluaran langsung (output) dan keluaran tidak langsung (outcome). Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan merupakan sarana melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan. Sekolah bukan hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul antara guru dan peserta didik, melainkan suatu sistem yang sangat kompleks dan dinamis. Dalam model ini akan menerangkan bagaimana pengaruh dari penggabungan sekolah (merger) dengan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Keterkaitan hal ini adalah pada manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumberdaya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak proses tersebut. Manajemen perubahan ditujukan untuk memberi solusi bisnis yang diperlukan dengan sukses dengan cara terorganisir dan dengan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Penggabungan sekolah atau merger

berarti mengalami suatu perubahan dalam hal fisik dan non fisik agar bisa dipertahankan. Salah satu sasaran manajemen perubahan adalah mengupayakan agar proses transformasi tersebut itu berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan-kesulitan seminimal mungkin. Keharusan dalam melaksanakan perubahan dalam saat ini tidak boleh menunggu hingga sebuah organisasi tersebut mengalami sebuah proses kemunduran, maka dari itu mereka harus melaksanakan perubahan- perubahan yang perlu diprediksi dan diantisipasi kebutuhan akan perubahan.

Dalam buku manajemen perubahan (management of change) ada berbagai macam alasan mengapa organisasi-organisasi berubah, dan banyak terdapat tipe perubahan yang dilaksanakan oleh mereka seperti misalnya perubahan yang timbul karena kegiatan restrukturisasi, re-engineering, dan e- engineering dan TQM (Total Quality Management). Konsep dasar penggabungan sekolah (merger) yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri, tentang pedoman pelaksanaan penggabungan sekolah (merger) sekolah dasar (SD)yaitu: (1) Penggabungan (merger) SD adalah usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan (institusi) SD dan

diselenggarakan dalam satu pengelolaan; (2) Lingkup penggabungan SD meliputi SD yang terdapat antar desa/kelurahan yang sama dan atau di desa/kelurahan yang berbatasan dan atau antar kecamatan yang berbatasan; (3) Sekolah Dasar kemudian disingkat dengan SD adalah bentuk satuan pendidikan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun; (4) SD inti adalah SD yang terpilih antara beberapa SD dalam satu gugus sekolah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan di dalam gugus SD tersebut; (5) SD imbas adalah anggota satu gugus sekolah yang menjadi binaan SD inti; (6) SD kecil adalah SD di daerah terpencil yang belum memenuhi syarat pembakuan. Dari pengertian di atas salah satu program pemerintah ialah program merger SD di sebagian daerah sudah mulai dilaksanakan.

Menurut artikel Suparlan yang berjudul "merger sekolah dasar, begitu perlukah?" tentang program ini memang menjadi salah satu kebijakan yang telah diluncurkan oleh pemerintah, namun pelaksanaan program ini di beberapa daerah masih menghadapi berbagai kendala karena beberapa faktor antar alain (1) faktor kekhawatiran akan hilangnya posisi

kepala sekolah. Apalagi jika kepala sekolahnya masih relatif muda. Memindahkan atau memarkirnya tentu menjadi kendala tersendiri. (2) faktor kekhawatiran akan kehilangan jejak sejarah lembaga sekolah yang pada awalnya memang telah didirikan dengan susah payah. Jika ktor pertama datang dari dalam (intern), maka faktor kedua biasanya datang dari luar (ekstern), misalnya dari tokoh masyarakat yang sejak awal ikut mendirikan sekolah tersebut. Proses merger SD menjadi mudah dilakukan jika kedua faktor itu dapat diatasi.

Pengertian Administrasi

Administrasi berdasarkan etimologis (asal kata) bersumber dari bahasa latin, yang terdiri dari ad + ministrare, yang secara operasional berarti melayani, membantu dan memenuhi. Menurut pendapat Prof. Dr. H. Hadari Nawawi dan Ora. H. M. Martini Hadari dalam buku Ilmu Administrasi (1994 : 28) disebutkan Administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses pengendalian suatu organisasi agar secara keseluruhan selalu terarah pada pencapaian tujuannya. Dengan demikian Administrasi berarti rangkaian kegiatan atau proses pengendalian cara atau sistem kerja sama sejumlah orang, agar

berlangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama. Para praktisi cenderung pada administrasi dalam pengertian operasional, dengan demikian rumusan-rumusan para ilmuwan yang bergerak dilingkungan Ilmu Administrasi harus bersifat applied (terpakai) agar dapat dipetik manfaatnya oleh orang-orang yang menempati posisi sebagai administrator. Sehubungan dengan itu Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (1974 : 2) mengatakan bahwa Administrasi adalah "keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha (pemerintah) agar tujuan tercapai. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan sifat terpakai dari Ilmu Administrasi sebagai berikut:

Administrasi merupakan kegiatan manusia dan berlangsung berupa proses pengendalian interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk kerja sama. Interaksi yang disebut kerja sama itu adalah gejala sosial, yang bilamana dikendalikan dengan mempergunakan administrasi, akan

berlangsung efektif dan efisien. Dengan demikian berarti langkah-langkah yang dirumuskan Ilmu Administrasi harus bersifat terpakai bagi perwujudan kerja sama yang efektif dan efisien dalam mencapai satu atau lebih tujuan.

Administrasi merupakan proses pengendalian yang sadar tujuan. Dengan demikian berarti langkah-langkah yang dirumuskan Ilmu Administrasi harus bersifat terpakai bagi perwujudan kegiatan yang berkualitas, sehingga menjadi kegiatan yang tinggi produktifitasnya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Administrasi tidak bennaksud menghasilkan kegiatan kerja sama yang tidak produktif dalam mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain Administrasi merupakan ilmu terapan untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan melalui kerja sama sejumlah orang.

Administrasi berlangsung untuk mempersatukan gerak langkah sejumlah manusia. Dengan demikian berarti langkah-langkah pengendalian yang akan dilaksanakan harus bersifat terpakai dalam mewujudkan kesatuan gerak sejumlah manusia dalam melaksanakan tugas-tugas bersama. Gerak yang serentak dan tidak saling menjegal itu tidak saja dilakukan secara perseorangan, tetapi juga oleh kelompok-kelompok kecil atau unit-unit kerja di dalam

sebuah organisasi. Dengan demikian kata lain Administrasi harus bersifat terpakai dalam menghilangkan pengkotakan kerja, agar menjadi satu kesatuan kerja yang saling menunjang secara kompak.

Administrasi merupakan ilmu yang terpakai dalam merangkai suatu harapan di dalam perencanaan dengan usaha berupa realisasi kegiatan sesuai perencanaan dan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kesenambungan mengandung makna bahwa administrasi terpakai dalam mengembangkan kegiatan secara terarah dan mampu menghindari penyimpangan-penyimpangan sebelum terjadi agar tidak merugikan organisasi.

Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian (orang atau kelompok) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan terdata menurut W.J.S. Poerwadarminta Begitu juga menurut Max Weber organisasi ialah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu Menurut Robbins (2006), setiap organisasi merupakan sistem yang khas, sehingga organisasi mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri. Oleh

karena itu, setiap organisasi pasti memiliki budaya yang khas pula.

Dengan mendasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem yang diyakini bersama yang berasal dari falsafah atau prinsip awal pendirian organisasi kemudian, berinteraksi menjadi norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan organisasi dan kelompok yang terstruktur yang didalamnya ada anggaran dasar rumah tangga AD/ART yang harus di taat ketua berserta jajarannya.

Manajemen

Davis(1951) berpendapat bahwa manajemen merupakan sebuah fungsi dari setiap bentuk kepemimpinan eksekutif yang ada dimanapun. Menurut pernyataan Ordway Tead yang sudah disadur Drs.He.Rosyidi di dalam buku "Organisasi dan Management" didefinisikan jika manajemen merupakan sebuah proses serta kegiatan pelaksanaan usaha untuk memimpin serta menunjukkan arah penyelenggaraan tugas sebuah organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil makna bahwa manajemen mengandung arti optimalisasi sumber-

sumber daya atau pengelolaan dan pengendalian. Sumber-sumber daya yang dioptimalkan, dikelola, dan dikendalikan tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber pendukung lainnya. Proses tersebut mencakup langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Manajemen bagi setiap organisasi atau lembaga merupakan unsure pokok yang harus dijalankan oleh setiap pimpinan organisasi atau lembaga tersebut. Para pimpinan tersebut bertindak sebagai manajer sehingga harus menggunakan sumber daya organisasi, keuangan, peralatan dan informasi serta sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting bagi setiap organisasi. Tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan (state goals) mengandung arti bahwa para pemimpin atau manajer organisasi apapun berupaya untuk mencapai berbagai hasil akhir spesifik, tentu saja harus unik bagi masing-masing organisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Implementasi Kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri

Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kota Tangerang Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan metodologi penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan penelitian ini merupakan studi kasus, konteks penelitian ini akan mengungkap fenomena sosial yang beragam dan mengungkap dan memahami fenomena yang belum diketahui dan belum banyak diketahui. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama karena dialah yang akan memahami secara mendalam obyek, dan dapat mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif menekankan pada upaya menampilkan informasi, narasi, dan proposisi dalam bentuk deskripsi-deskripsi yang bersifat kualitatif dan analitis.

Pertimbangan menggunakan metode kualitatif yaitu pertama: Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua : Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga : Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri

dengan ban yak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian tentang implementasi perda ini akan mengambil lokasi di sekitar Jakarta.

Lokasi Penelitian ini tepatnya di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli, Sekolah Dasar Negeri dan Pegawai yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang dijadikan obyek penelitian. Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan penggabungan sekolah dasar Negeri dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, dan juga melihat faktor-faktor hambatannya yang berada ditempat penelitian ini. Adapun informan yang akan diwawancarai dalam melakukan penelitian adalah: sepuluh informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa orang-orang tersebut menurut penulis mewakili dinas pendidikan dan pihak sekolah dasar, sehingga dapat menyampaikan hal yang nyata dalam "Implementasi kebijakan penggabungan sekolah dasar Negeri dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan di Kota Tangerang Selatan" setiap harinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Berikut saya akan sedikit info tentang pengertian Implementasi menurut para ahli. Semoga info tentang pengertian Implementasi menurut para ahli bisa bermanfaat. Secara sederhana Implementasi bisa diartikan Pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan Implementasi sebagai Evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70), Mengemukakan bahwa "Implementasi adalah Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan ". Pengertian Implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (Dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "Implementasi adalah sistem rekayasa". Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata Implementasi bermuara pada aktivitas,

adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Ungkapan Mekanisme mengandung arti bahwa Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, Implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum. Dalam kenyataannya, Implementasi Kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, Program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks Implementasi Kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan diatas memberikan tekanan pada proses. Esensinya Implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan berbeda. Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan Implementasi itu dilakukan sebelum

penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002) menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembangan dan guru (praktisi pendidikan). Pengembangan melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan ts/rnaterl baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba dilapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan.

Implementasi dianggap selesai manakala Proses penyempurnaan Program baru dipandang sudah lengkap. Sedangkan Pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2002) memandang Implementasi sebagai bagian dari program Kurikulum. Proses Implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi

program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi)

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik didalam ilmu politik. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan public lebih ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi Negara. Artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (didalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan stakeholder lain yang menyangkut

tentang public yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi. Dari sudut pandang politik, kebijakan public boleh dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi diarah Negara dengan actor-aktor yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005: 102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan".

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan

merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) dalam buku implementasi kebijakan public menjelaskan menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui, Kegiatan ini terletak antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternative-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, Artinya Implementasi kebijakan menentukan keberhasilan atau suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Tachjan (2006:26) dalam buku Implementasi Kebijakan Publik menjelaskan tentang unsure-unsur dan implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a) Unsur Pelaksana
- b) Adanya Program yang dilaksanakan serta
- c) Target group atau kelompok sasaran

Unsur pelaksanan adalah implementor kebijakan yang diterangkan Tachjan (2006:26) dalam buku Implementasi Kebijakan Publik menjelaskan sebagai berikut: "Pelaksana Kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan serta strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan, program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian". Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan public adalah birokrasi seperti dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006:27) unit-unit birokrasi menempati posist dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan Publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

KESIMPULAN

Penggabungan sekolah dilakukan dengan merencanakan peserta didik, tenaga pendidik dan sarana prasarana yang ditentukan oleh tim penggabungan sekolah dan disetujui oleh walikota, dalam implementasi kebijakan penggabungan, dindik tangsel memiliki tim khusus yang menangani yang terdiri

dari pihak Dindik dan UPT pendidikan di setiap kecamatan, semua berjalan dengan lancar namun masih kurang dalam hal koordinasi antara panitia dengan pengurus barang atau Aset yang menyebabkan perbedaan antara inventarisasi yang dimiliki oleh pihak pengurus barang karena tidak memiliki hasil dari pendataan.

Penggunaan Sarana dan prasarana di setiap Sekolah dasar sudah maksimal dan baik, setiap SON mendapatkan Sarana dan Prasarana sesuai dengan yang dibutuhkan diakibatkan adanya pemerataan atau penyatuan Aset menunjukkan ketercapaian tujuan dari program penggabungan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi berupa penyesuaian antara peserta didik dan tenaga pendidik masih bisa diatasi namun proses penyelesaian masih membutuhkan waktu yang lama, ini dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar siswanya, tetapi dari program penggabungan SON tersebut Efisiensi pembiayaan pendidikan dapat tercapai, efektifitas penyelenggaraan pendidikan tercapai, dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Tangerang Selatan khususnya untuk sekolah dasar meningkat menunjukkan adanya hasil positif.

SARAN

Di dalam pelaksanaan pendataan sekolah seharusnya dilakukan secara bersama oleh tim penggabungan sekolah tingkat kecamatan dalam satu forum sehingga kesepakatan yang terbaik akan tercapai, selain itu beban kerja tidak menumpu hanya pada beberapa orang dan lebih menghemat waktu dan tenaga, di dalam implementasi kebijakan pengorganisasian tim penggabungan seharusnya dilakukan secara terperinci sehingga tidak adanya pihak yang tidak dilibatkan yang memang perannya sangat penting.

Agar menghindarkan dari pendataan yang kurang sesuai dengan yang dilapangan harus adanya semacam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah tersebut seperti kegiatan pendataan atau rekapitulasi Aset Sekolah setiap tahunnya Penyelenggaraan monitoring program penggabungan lebih direncanakan, lebih terstruktur lagi agar tidak memakan waktu lama untuk masyarakat sekolah untuk terbiasa dalam situasi dan kondisi baru pasca digabungnya sekolah tersebut .

DAFTAR PUSTAKA

- Ermaya Suradinata, (1997), Psikologi Kepegawaian Dalam Peranan Kepegawaian Dalam Motivasi Kerja, CV, Ramadhan, Bandung.

- Hasibuan, Melayu, SP, (2003), Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Hasibuan Malayu, 2008, "Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah", Jakarta: umi Aksara Handoko Hani, 1999, "Manajemen Edisi 2", Yogyakarta: BPFE
- Kartono, Kartini. (1992). Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu. Jakarta: Rajawali Press.
- Mukidjat, (1985), Manajemen Kepegawaian, Alumni, Bandung.
- Pamudji, S. (1995), Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Poerwanto. 2006. New Business Administration. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Mufiz, ali. 2009. 2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara Edisi I. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Soebagio Sastrodiningrat, (2002), Kapita Selekta Manajemen dan Kepemimpinan, Ind Hill co. Jakarta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2006).
- Suradinata, Ermaya. 1997, Pemimpin Dan Kepemimpinan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. Drs. MpA, 1987, Perspektif Perilaku Birokrasi. Jakarta: CV. Rajawali.
- <http://politik.kompasiana.com/2011/05/25/kondisi-kepemimpinan-indonesia-dan-tantangan-ke-depan-367172.html>